

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas oleh DPRD dan hasilnya disampaikan dalam bentuk rekomendasi sebagai umpan balik (*feedback*) kepada pemerintah daerah untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, yang disampaikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Tahun 2018 disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur disusun dengan sistematika sebagai berikut :

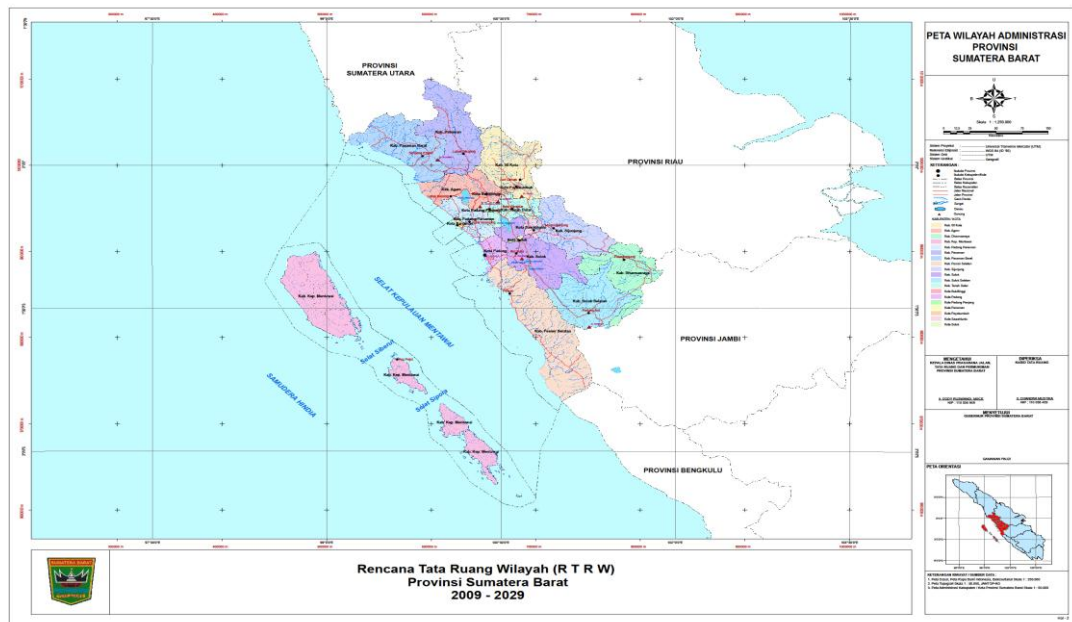
BAB I	Pendahuluan
BAB II	Kebijakan Pemerintahan Daerah
BAB III	Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB IV	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
BAB V	Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
BAB VI	Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum
BAB VII	Penutup

B. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak antara 98° 36'-101° 53' Bujur Timur dan 0° 54' Lintang Utara sampai dengan 3° 30' Lintang Selatan, dengan luas daratan $\pm 42.297,30 \text{ Km}^2$ dan luas perairan (laut) $\pm 52.882,42 \text{ Km}^2$ dengan panjang garis pantai wilayah daratan $\pm 375 \text{ Km}$ ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai $\pm 1.003 \text{ Km}$ sehingga total garis pantai keseluruhan $\pm 1.378 \text{ Km}$. Perairan laut ini memiliki 180 pulau-pulau besar dan kecil. Secara administratif, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten/kota (12 kabupaten dan 7 kota) yang mempunyai 179 kecamatan dengan 245 kelurahan, 759 nagari dan 126 desa dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah timur dengan Provinsi Riau dan Jambi, sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Peta administrasi Provinsi Sumatera Barat seperti Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat



Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2029

Sumatera Barat berdasarkan letak geografisnya tepat dilalui garis khatulistiwa (garis lintang nol derajat) tepatnya di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Karena itu Sumatera Barat mempunyai iklim tropis dengan rata-rata suhu udara $25,78^{\circ}\text{C}$ dan rata-rata kelembaban yang tinggi yaitu 86,67% dengan tekanan udara rata-rata berkisar 994,69 mb. Pengaruh letak ini, maka menurut ketinggiannya, wilayah di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi mulai dari dataran rendah di pantai dengan ketinggian 0 m hingga dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian > 3000 m di atas permukaan laut (dpl). Luas areal yang mempunyai ketinggian 0 sampai 100 m dpl meliputi 1.286.793 ha (30,41%), daerah dengan ketinggian 100 – 500 m dpl mencapai 643.552 ha (15,21%), antara 500 – 1.000 m dpl seluas 1.357.045 ha (32,07%), antara 1.000 – 1.500 m dpl terdapat 767.117 ha (18,13%), daerah dengan ketinggian 1.500 – 2.000 m dpl tercatat 113.116,6 Ha (2,67%), dan sisanya daerah dengan ketinggian di atas 2.500 m dpl.

Dengan kondisi topografi tersebut di atas, potensi sumberdaya alam yang terdapat di Sumatera Barat memiliki berbagai variasi intensitas dan penggunaannya. Pada dataran rendah intensitas penggunaan lahan dapat lebih maksimal, sementara itu pada dataran tinggi intensitas penggunaan lahannya akan dihadapkan pada faktor pembatas lahan. Untuk itu diharapkan pemanfaatan lahan agar dapat dikelola secara optimal, harus terlebih dahulu secara seksama memperhatikan kondisi lahan dengan tidak mengabaikan dampak lingkungan, sehingga tidak terjadi kerusakan berdampak negatif untuk masa kini dan yang akan datang. Dataran tinggi di wilayah Sumatera Barat sebagian besar merupakan jajaran perbukitan dan

pegunungan termasuk rantai Pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari utara hingga selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan perbukitan dan pegunungan tersebut dengan kelerengan di atas 40% tercatat 1.017.000 Ha.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tatanan geologi kompleks. Kondisi ini disebabkan letaknya yang berbeda pada daerah tumbukan dua lempeng tektonik besar yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan dan lempeng Euroasia di bagian utara yang ditandai dengan terdapatnya pusat-pusat gerakan tektonik di Kepulauan Mentawai dan sekitarnya. Akibat tumbukan kedua lempeng besar ini selanjutnya muncul gejala tektonik lainnya yaitu busur magmatik yang ditandai dengan munculnya rangkaian pegunungan Bukit Barisan beserta gunung apinya dan sesar/patahan besar Sumatera yang memanjang searah dengan zona tumbukan kedua lempeng yaitu utara-selatan.

Pada sisi lain, tatanan geologi ini berdampak positif bagi Provinsi Sumatera Barat. Dampak positif tersebut berupa munculnya mineral-mineral berharga seperti emas, perak, bijih besi, mangan, timah hitam, obsidian dan lain-lain; tanah yang subur dan banyak sumber air bersih maupun air panas yang berasal dari kawasan geomorfologi struktural namun dekat dengan sumber panas bumi yang berasal dari magma dangkal. Dengan demikian Sumatera Barat merupakan provinsi yang mempunyai potensi sumber daya alam yang memadai untuk dieksploitasi bagi pembangunan.

Struktur geologi yang berkembang adalah struktur perlipatan (antiklinorium) dan struktur sesar dengan arah umum barat laut – tenggara, yang mengikuti struktur regional Pulau Sumatera. Struktur yang terdapat berupa Great Sumatera Fault di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera dan Mentawai Fault di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan *micro plate*. Selain geologi dasar laut, di daratan terdapat patahan semangka yang membujur dari Solok Selatan sampai Pasaman. Kondisi ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat memiliki kerawanan bencana gempa bumi yang tinggi.

2. Kondisi Demografi

Berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, yang dihitung dari jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah lebih dari 6 bulan, total penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 berjumlah 4.865.33 ribu jiwa dengan rincian penduduk laki-laki 2.409,2 ribu jiwa dan perempuan 2.456,1 ribu jiwa.

Sedangkan hasil proyeksi penduduk Sumatera Barat Tahun 2017 yang telah dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat totalnya adalah 5.259,5 ribu jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sejumlah 2.617,2 ribu jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 2.642,3 ribu jiwa.

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan, yang secara universal penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan, maka kualitas penduduk perlu ditingkatkan dan pertumbuhan serta mobilitasnya harus dikendalikan.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2012 – 2017(dalam ribuan)

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016	2017	2018
KABUPATEN						
Kep.Mentawai	81.840	83.603	85.295	86.981	87	91.156
Pesisir Selatan	442.681	446.479	450.186	453.822	453.80	463.474
Solok	353.383	361.095	363.684	366.213	366.20	372.512
Sijunjung	214.560	218.588	222.512	226.300	226.30	235.588
Tanah Datar	342.864	343.875	344.828	345.706	345.70	348.073
Padang Pariaman	400.890	403.530	406.076	408.612	408.60	414.714
Agam	468.970	472.995	476.881	480.722	480.70	489.834
Lima Puluh Kota	361.645	365.389	368.985	372.568	372.60	381.110
Pasaman	263.838	266.888	269.883	272.804	272.80	279.969
Solok Selatan	153.943	156.901	159.796	162.724	162.70	169.667
Dharmasraya	210.686	216.928	223.112	229.313	229.30	244.248
Pasaman Barat	392.907	401.624	410.307	418.785	418.80	439.303
KOTA						
Padang	876.670	889.561	902.413	914.968	915	944.919
Solok	63.541	64.819	66.106	67.307	67.30	70.299
Sawahlunto	58.972	59.608	60.186	60.778	60.80	62.176
Padang Panjang	49.536	50.208	50.883	51.712	51.70	53.367
Bukittinggi	118.260	120.491	122.621	124.715	124.70	129.670
Payakumbuh	123.654	125.690	127.826	129.807	129.80	134.646
Pariaman	82.636	83.610	84.709	85.691	85.70	88.119
SUMBAR	5.066.476	5.131.882	5.196.289	5.259.528	5.259.50	5.411.844

Sumber Data : BPS, Publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020

Berdasarkan hasil sensus penduduk dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Sumatera Barat Tahun 2018 adalah sebesar 1,5% jika dibandingkan dengan penduduk pada Tahun 2017. Sedangkan jumlah penduduk Sumatera Barat Tahun 2018 yang dihitung berdasarkan e-KTP adalah sebanyak 5.469.083 jiwa dengan rincian penduduk menurut jumlah laki-laki sebanyak 2.766.677 orang dan penduduk perempuan sebanyak 2.702.406 orang, dengan sebaran sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK
KABUPATEN		
1	Pesisir Selatan	518.265
2	Solok	375.801
3	Tanah Datar	366.136

4	Agam	524.906
5	Pasaman	315.470
6	Padang Pariaman	462.125
7	Lima Puluh Kota	374.067
8	Solok Selatan	177.462
9	Sijunjung	233.444
10	Dharmasraya	205.127
11	Kep.Mentawai	83.517
12	Pasaman Barat	428.641
KOTA		
13	Kota Padang	883.767
14	Kota Padang Panjang	53.094
15	Kota Bukittinggi	115.986
16	Kota Payakumbuh	129.751
17	Kota Solok	68.241
18	Kota Sawahlunto	64.299
19	Kota Pariaman	88.984
TOTAL		5.469.083

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan e-KTP Tahun 2018

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
KABUPATEN				
1	Pesisir Selatan	263.064	255.201	518.265
2	Solok	190.564	185.237	375.801
3	Sijunjung	118.290	115.154	233.444
4	Tanah Datar	183.537	182.599	366.136
5	Padang Pariaman	234.607	227.518	462.125
6	Agam	265.168	259.738	524.906
7	Lima Puluh Kota	187.127	186.940	374.067
8	Pasaman	159.100	156.370	315.470
9	Kep. Mentawai	43.575	39.942	83.517
10	Dharmasraya	104.510	100.617	205.127
11	Solok Selatan	90.814	86.648	177.462
12	Pasaman Barat	218.279	210.362	428.641
KOTA				
13	Padang	446.750	437.017	883.767
14	Solok	34.151	34.090	68.241
15	Sawahlunto	32.232	32.067	64.299
16	Padang Panjang	26.729	26.365	53.094
17	Bukittinggi	58.062	57.924	115.986
18	Payakumbuh	65.186	64.565	129.751
19	Pariaman	44.932	44.052	88.984
Sumatera Barat		2.766.677	2.702.406	5.469.083

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018

3. Kondisi Kemiskinan

Perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin tidak akan terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan

rata-rata pengeluaran perkapita per-bulan yang digunakan untuk mengklarifikasikan penduduk ke dalam golongan miskin atau tidak miskin.

Garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin September 2018 adalah Rp.455.797,43 (kapita/bulan). Peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan makanan jauh lebih besar dibandingkan komoditi non makanan. Pada bulan September 2018, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 76,44%. Jika dibedakan menurut daerah perkotaan dan pedesaan maka sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan di pedesaan sebesar 80,37%, lebih besar dibandingkan daerah perkotaan yang hanya 71,38%. Komposisi tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi Maret 2018. Jika dibandingkan antara September 2018 dengan Maret 2018, maka garis kemiskinan daerah perkotaan meningkat sebesar 0,58%. Sedangkan di daerah pedesaan meningkat 0,49%. Jika dilihat menurut komponennya maka terjadi perbedaan antara perkotaan dan pedesaan. Di daerah pedesaan garis kemiskinan non makanan mengalami perubahan yang lebih besar dari pada garis kemiskinan makanan, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4

Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah di Provinsi Sumatera Barat Kondisi Maret 2012-September 2018

TAHUN	GARIS KEMISKINAN (RP/KAPITA/BULAN)			JUMLAH PENDUDUK MISKIN (000 JIWA)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
	MAKANAN	NON MAKANAN	TOTAL		
PERKOTAAN					
Maret 2012	223.796	85.317	309.113	127,81	6,67
Sept 2012	232.153	88.975	321.128	124,25	6,45
Maret 2013	235.317	97.520	332.837	119,53	6,17
Sept 2013	261.644	99.124	360.768	124,89	6,38
Maret 2014	269.473	105.495	374.968	108.076	5.43
Sept 2014	282.276	108.587	390.862	108.532	5,41
Maret 2015	288.410	117.925	406.335	118.034	5,73
Sept 2015	301.356	121.984	423.339	118.480	5,73
Maret 2016	312.154	129.369	441.523	118.962	5,54
Sept 2016	322.168	132.506	454.674	119.510	5,52
Maret 2017	337.132,91	135.481	472.614	113,01	5,14
Sept 2017	339.339,87	136.026	475.365	114,59	5,11
PEDESAAN					
Maret 2012	207.242	50.733	257.975	276,93	9,14
Sept 2012	219.987	53.668	273.655	273,60	8,99
Maret 2013	231.942	56.272	288.215	287,94	9,39
Sept 2013	257.459	63.792	321.252	255,74	8,30
Maret 2014	268.291	65.220	333.511	271.120	8,68
Sept 2014	279.289	70.535	349.824	246.206	7,84
Maret 2015	293.768	75.985	369.753	261.575	8,33
Sept 2015	313.294	77.884	391.178	231.050	7,35
Maret 2016	332.415	81.375	413.790	252.593	8,16
Sept 2016	341.816	83.703	425.520	257.000	8,27
Maret 2017	352.878,21	86.342	439.220	251,50	8,1
Sept 2017	354.770,78	86.644	441.415	245,41	7,94

Maret 2018	-	-	-	242,29	8,07
KOTA + DESA					
Maret 2012	213.655	64.129	277.784	404,74	8,18
Sept 2012	224.702	67.350	292.052	397,86	8,00
Maret 2013	233.250	72.252	305.502	407,47	8,14
Sept 2013	259.085	77.521	336.606	380,63	7,56
Maret 2014	268.751	80.904	349.656	379,19	7,41
Sept 2014	280.453	85.374	365.827	354,74	6,89
Maret 2015	291.641	92.637	384.277	379.609	7,31
Sept 2015	308.554	95.393	403.947	349.530	6,71
Maret 2016	326.993	98.148	425.141	371.555	7,09
Sept 2016	334.358	103.717	438.075	376.510	7,14
Maret 2017	346.896,34	106.715	453.611,34	364,51	6,87
Sept 2017	348.429,43	107.368	455.797,43	359,99	6,75
Maret 2018	--	-	-	357,13	6,65

Sumber Data : Berita Resmi Statistik No. 04/01/13/Th. XXI, 02 Januari 2018

Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Sumatera Barat, yang dirilis dalam Berita Resmi Statistik Nomor 04/01/13/Th XX/ 3 Januari 2017, dimana untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat pada kondisi September 2017 adalah 359.990 jiwa, mengalami kenaikan 4.520 jiwa (1,25%) dibanding Maret 2017 (data SUSENAS dikeluarkan 2 kali setahun yaitu pada bulan Maret dan September), Maret 2018 mengalami penurunan menjadi 357,13

Lebih dari dua pertiga penduduk miskin atau tepatnya 68,17 % penduduk miskin tinggal di pedesaan, lebihnya sekitar 31,83 % penduduk miskin tinggal di perkotaan, seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.5

**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat
Maret 2013 – September 2018**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)			Persentase Penduduk Miskin		
	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
Maret 2013	120.604	290.518	411.121	6,16	9,39	8,14
Sept 2013	126.024	258.061	384.085	6,38	8,30	7,56
Maret 2014	108.076	271.120	379.196	5,43	8,68	7,41
Sept 2014	108.532	246.206	354.738	5,41	7,84	6,89
Maret 2015	118.034	261.575	379.609	5,73	8,35	7,31
Sept 2015	118.481	231.048	349.529	5,73	7,35	6,71
Maret 2016	118.962	252.593	371.555	5,54	8,16	7,09
Sept 2016	119.510	257.000	376.510	5,52	8,27	7,14
Maret 2017	113,01	251,50	364,51	5,14	8,1	6,87
Sept 2017	114,59	245,41	359,99	5,11	7,94	6,75
Maret 2018	114,84	242,29	357,13	4,86	8,07	6,55

Sumber Data : Berita Resmi Statistik No. 04/01/13/Th. XXI, 02 Januari 2018

Dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, namun juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Sumatera Barat dapat terlihat pada tabel 1.6 berikut ini.

Tabel 1.6
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)

TAHUN	KOTA	DESA	KOTA+DESA
P1			
Maret 2013	0,999	1,019	1,011
September 2013	1,117	1,363	1,267
Maret 2014	0,654	1,122	0,940
September 2014	0,536	0,888	0,751
Maret 2015	0,785	1,104	0,977
September 2015	1,056	1,392	1,259
Maret 2016	0,752	1,334	1,096
September 2016	1,038	1,180	1,122
Maret 2017	0,75	1,18	1,00
September 2017	0,60	1,127	0,99
Maret 2018	0,66	1,329	1,035
P2			
Maret 2013	0,238	0,191	0,209
September 2013	0,292	0,313	0,305
Maret 2014	0,125	0,278	0,219
September 2014	0,096	0,181	0,148
Maret 2015	0,161	0,224	0,211
September 2015	0,245	0,320	0,290
Maret 2016	0,153	0,304	0,242
September 2016	0,249	0,299	0,278
Maret 2017	0,16	0,28	0,23
September 2017	0,11	0,32	0,23
Maret 2018	0,14	0,32	0,24

Sumber Data : Berita Resmi Statistik No. 04/01/13/Th. XXI, 02 Januari 2018

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dari Maret 2018 ke September 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk miskin semakin baik dari garis kemiskinan. Kondisi tersebut bersifat positif bagi upaya pengentasan kemiskinan. Begitu juga jika dibedakan menurut perkotaan dan pedesaan

maka indeks kedalaman kemiskinan di pedesaan maupun perkotaan juga mengalami penurunan. Sementara untuk Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) terlihat bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin relatif sama. Indeks untuk daerah perkotaan mengalami penurunan dan pedesaan menunjukkan adanya peningkatan yang berarti ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga meningkat.

4. Kondisi Ketenagakerjaan

Berdasarkan Berita Resmi Statistik No.62/11/13/Th XX yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Sumatera Barat tanggal 06 November 2017, keadaan ketenagakerjaan di Sumatera Barat pada Agustus 2017 menunjukkan perkembangan positif di pasar tenaga kerja Sumatera Barat, yang digambarkan dengan naiknya jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk bekerja dan disertai dengan turunnya tingkat pengangguran dibandingkan kondisi Agustus 2016 (dihitung dua kali setahun yaitu bulan Februari dan Agustus).

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2018 sebanyak 133,94 juta orang, naik 2,39 juta orang dibanding Februari 2017. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Februari 2018, sebanyak 127,07 juta orang penduduk bekerja sedangkan sebanyak 6,87 juta orang menganggur. Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah 2,53 juta orang sedangkan pengangguran berkurang 140 ribu orang.

Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat. TPAK pada Februari 2018 tercatat sebesar 69,20 persen, meningkat 0,18 persen poin dibanding setahun yang lalu. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja.

Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Februari 2018, TPAK laki-laki sebesar 83,01 persen sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 55,44 persen. Namun demikian, dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu, TPAK perempuan meningkat sebesar 0,40 persen poin sedangkan TPAK laki-laki menurun 0,04 persen poin. seperti terlihat pada tabel 1.7 berikut ini.

Tabel 1.7
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama
Tahun 2017-2018

Jenis Kegiatan Utama	Setahun Lalu	Semester Lalu	Saat Ini	Perubahan 1 Tahun (Feb 2017–Feb 2018)		Perubahan 1 Semester (Ags 2017–Feb 2018)	
	Februari 2017	Agustus 2017	Februari 2018				
	Juta Orang			Juta Orang	Persen	Juta Orang	Persen
Penduduk Usia	190,59	192,08	193,55	2,96	1,55	1,47	0,77

Kerja							
Angkatan Kerja	131,55	128,06	133,94	2,39	1,82	5,88	4,59
Bekerja	124,54	121,02	127,07	2,53	2,03	6,05	5,00
Pengangguran	7,01	7,04	6,87	-0,14	-2,00	-0,17	-2,41
Bukan Angkatan Kerja	59,04	64,02	59,61	0,57	0,97	-4,41	-6,89
Sekolah	15,24	16,49	15,61	0,37	2,43	-0,88	-5,34
Mengurus Rumah Tangga	36,08	39,92	36,01	-0,07	-0,19	-3,91	-9,79
Lainnya	7,72	7,61	7,99	0,27	3,50	0,38	4,99
Persen poin				Persen poin		Persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,33	5,50	5,13	-0,20		-0,37	
Perkotaan	6,50	6,79	6,34	-0,16		-0,45	
Perdesaan	4,00	4,01	3,72	-0,28		-0,29	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,02	66,67	69,20	0,18		2,53	
Laki-Laki	83,05	82,51	83,01	-0,04		0,50	
Perempuan	55,04	50,89	55,44	0,40		4,55	

Sumber : Berita Resmi Statistik No.62/11/13/Th.XX Tanggal 6 November 2018

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Februari 2017 sebesar 5,33 persen turun menjadi 5,13 persen pada Februari 2018.

Dilihat dari daerah tempat tinggalnya, TPT di perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding di perdesaan. Pada Februari 2018, TPT di perkotaan sebesar 6,34 persen, sedangkan TPT di wilayah perdesaan hanya sebesar 3,72 persen. Dibandingkan setahun yang lalu, TPT di perkotaan dan TPT di perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,16 persen poin dan 0,28 persen poin.

Dilihat dari tingkat pendidikan pada Februari 2018, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tertinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 8,92 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Diploma I/II/III sebesar 7,92 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan Diploma I/II/III. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, dapat dilihat dari TPT SD ke bawah paling kecil diantara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 2,67 persen. Dibandingkan kondisi setahun yang lalu, peningkatan TPT terjadi pada tingkat pendidikan Diploma I/II/III, Universitas, dan SMA, sedangkan TPT pada tingkat pendidikan lainnya menurun.

5. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Jumlah penduduk yang bekerja pada setiap kategori lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Februari 2018

masih didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 30,46 persen; Perdagangan sebesar 18,53 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 14,11 persen (Gambar 2 dan Lampiran 1).

Dilihat berdasarkan tren lapangan pekerjaan selama Februari 2017–Februari 2018, lapangan usaha yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,68 persen poin), Jasa Lainnya (0,40 persen poin), dan Industri Pengolahan (0,39 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan adalah Pertanian (1,41 persen poin), Konstruksi (0,20 persen poin), dan Jasa Pendidikan (0,16 persen poin)

Tabel 1.8
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kondisi Februari 2017 - 2018 Di
Provinsi Sumatera Barat (Ribu Orang)

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	2017		2018
		Februari	Agustus	Februari
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	31,87	29,58	30,46
2	Pertambangan dan Penggalian	1,09	1,15	1,09
3	Industri	13,72	14,51	14,11
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	0,53	0,59	0,61
5	Konstruksi	5,75	6,72	5,55
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	24,26	24,28	24,90
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	4,64	4,86	4,80
8	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	2,87	3,05	2,79
9	Jasa Lainnya	15,18	15,28	15,69
	Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Berita Resmi Statistik No.62/11/13/Th.XX Tanggal 6 November 2018

Dari seluruh penduduk bekerja pada Februari 2018, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai (38,11 persen), diikuti status berusaha sendiri (18,58 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap (16,48 persen), dan pekerja keluarga/tak dibayar (14,56

persen). Sementara penduduk yang bekerja dengan status pekerja bebas di pertanian memiliki persentase yang paling kecil yaitu sebesar 3,60 persen.

Dalam setahun terakhir (Februari 2017–Februari 2018), peningkatan persentase penduduk bekerja tertinggi pada status berusaha sendiri (1,03 persen poin). Penurunan terjadi pada status pekerja bebas di pertanian sebesar 0,70 persen poin, berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 0,61 persen poin, dan pekerja keluarga/tak dibayar sebesar 0,02 persen poin, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1.9
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Sumatera Barat
Kondisi Agustus 2017 - Agustus 2018

No.	Status Pekerjaan Utama	2017		2018
		Februari	Agustus	Februari
1	Berusaha Sendiri	17,55	19,13	18,58
2	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	17,09	14,89	14,56
3	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	3,57	3,26	3,68
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	38,08	39,71	38,11
5	Pekerja Bebas di Pertanian	4,30	4,83	3,60
6	Pekerja Bebas di Non Pertanian	4,83	5,92	4,99
7	Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	14,58	12,26	14,56
	Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Berita Resmi Statistik No.62/11/13/Th.XX Tanggal 6 November 2018

Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Pekerja formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Februari 2018 sebanyak 53,09 juta orang (41,78 persen) penduduk bekerja pada kegiatan formal dan sebanyak 73,98 juta orang (58,22 persen) bekerja pada kegiatan informal. Selama setahun terakhir, pekerja informal menurun dari 58,35 persen pada Februari 2017 menjadi 58,22 persen pada Februari 2018.

Tabel 1.10
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut
Jumlah Jam Kerja Perminggu di Sumatera Barat
Kondisi Agustus 2013- 2018 (%)

NO	JUMLAH JAM KERJA	AGUSTUS					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	1-7	3,02	1,88	1,80	1,95	2,85	2,94
2	8-14	8,11	5,69	4,97	5,89	5,83	5,79
3	15-24	17,96	14,35	12,59	11,48	12,07	10,73
4	25-34	14,36	14,99	14,53	13,15	13,45	12,01
5	1-34	43,45	36,91	33,89	32,49	34,19	68,53
6	35+*)	56,55	63,09	66,11	67,50	65,80	100,00

Sumber Data : Berita Resmi Statistik No.62/11/13/Th.XX, Tanggal 06 November 2018

Ket : *) Termasuk Sementara Tidak bekerja

Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2018 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) sebanyak 75,99 juta orang (59,80 persen). Sementara itu, penduduk bekerja berpendidikan menengah (SMA sederajat) sebanyak 35,87 juta orang (28,23 persen). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 15,21 juta orang (11,97 persen) mencakup 3,50 juta orang berpendidikan Diploma dan 11,71 juta orang berpendidikan Universitas.

Dalam setahun terakhir, persentase penduduk bekerja berpendidikan menengah meningkat dari 27,35 persen pada Februari 2017 menjadi 28,23 persen pada Februari 2018. Sementara persentase penduduk bekerja berpendidikan rendah dan tinggi turun masing-masing sebesar 0,59 persen poin dan 0,29 persen poin, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.11
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat Kondisi
Agustus 2013-Agustus 2018 (Persen)

NO	PENDIDIKAN TERTINGGI	AGUSTUS					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD ke Bawah	42,26	41,34	39,34	37,22	37,57	41,80
2	Sekolah Menengah Pertama	19,40	19,40	19,12	17,95	18,05	18,00
3	Sekolah Menengah Atas	17,29	18,01	19,52	18,15	20,22	16,78

4	Sekolah Menengah Kejuruan	9,32	9,43	9,47	11,89	9,69	11,45
5	Diploma I/II/III	3,52	3,47	3,08	4,27	3,69	2,75
6	Universitas	8,22	8,35	9,47	10,51	10,78	9,22
JUMLAH		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Berita Resmi Statistik No.62/11/13/Th.XX, Tanggal 06 November 2018

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Agustus 2017 sebesar 5,09%, naik menjadi 5,58% pada Agustus 2018.

Dilihat dari daerah tempat tinggalnya, TPT di perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding di pedesaan. Pada Agustus 2018, TPT di perkotaan sebesar 6,63%, sedangkan TPT pada wilayah pedesaan sebesar 4,71%. Dibandingkan tahun yang lalu, TPT wilayah pedesaan mengalami penurunan (0,43 poin), sementara peningkatan terjadi pada perkotaan (0,54 poin).

Dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2018, TPT untuk Diploma I/II/III paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 10,26%. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 8,55%. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat Diploma I/II/III dan SMK. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, dapat dilihat dari TPT SD ke bawah paling kecil diantara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 3,47%. Dibandingkan kondisi setahun yang lalu, TPT mengalami peningkatan pada tingkat pendidikan SD ke bawah, Diploma I/II/III, SMK dan Universitas sedangkan TPT pada tingkat pendidikan lainnya menurun.

Tabel 1.12

Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat Kondisi Agustus 2012-Agustus 2018 (Persen)

NO	PENDIDIKAN TERTINGGI	AGUSTUS					
		2012	2013	2014	2015	2016	2018
1	SD ke Bawah	3,87	3,85	3,90	2,98	2,63	3,47
2	Sekolah Menengah Pertama/ MTs	6,42	6,13	6,19	3,80	4,43	3,93
3	Sekolah Menengah Atas/MA	10,58	11,23	9,22	12,30	8,17	7,81
4	Sekolah Menengah Kejuruan	9,54	13,00	11,15	9,32	7,46	8,55
5	Diploma I/II/III	5,15	6,98	5,79	11,25	6,71	10,26
6	Universitas	8,07	8,30	8,46	8,23	5,76	6,78
JUMLAH		6,52	7,02	6,50	6,89	5,09	5,58

6. Kondisi Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menggunakan metode baru yang dirilis Tahun 2015, dimana IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), dimana IPM menjelaskan bagaimana penduduk antara lain dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge) serta standar hidup layak (decent standard of living).

Angka harapan hidup saat lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat, yang dihitung dari sensus dan survey kependudukan.

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Angka harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas, untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sedangkan pengeluaran perkapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli.

Hasil perhitungan IPM di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan penghitungan metode baru pada Tahun 2016 (angka tahun 2017 belum keluar dari BPS) adalah 70,73 dengan rincian komponen angka harapan hidup saat lahir adalah 68,73 tahun, harapan lama sekolah 13,79 tahun, rata-rata lama sekolah 8,59 tahun dan pengeluaran perkapita disesuaikan Rp.10.126 (Ribu/Orang/Tahun), seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.13
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2013-2017

NO	KOMPONEN IPM	SATUAN	TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017

1	Angka harapan Hidup	Tahun	68,00	68,21	68,32	68,66	68,73
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,81	13,16	13,48	13,60	13,79
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,27	8,28	8,29	8,42	8.59
4	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah/ Orang /Th)	9.479	9.570	9.621	9.804	10.126
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT			68,36	68,91	69,36	69,98	70,73

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2018.

Sedangkan bila dibandingkan dengan IPM rata-rata nasional maka IPM Provinsi Sumatera Barat sudah lebih tinggi dari IPM rata-rata nasional sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini :

Tabel 1.14
IPM Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
IPM SUMATERA BARAT

NAMA KAB/KOTA	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kepulauan Mentawai					
Pesisir Selatan	67.31	67.75	68.07	68.39	68.74
Solok	66.15	66.44	67.12	67.67	67.86
Sawah Lunto/Sijunjung	64.48	64.95	65.3	66.01	66.6
Tanah Datar	68.12	68.51	69.49	70.11	70.37
Padang Pariaman	67.15	67.56	68.04	68.44	68.9
Agam	68.73	69.32	69.84	70.36	71.1
Limapuluh Kota	66.3	66.78	67.65	68.37	68.69
Pasaman	62.91	63.33	64.01	64.57	64.94
Solok Selatan	65.86	66.29	67.09	67.47	67.81
Dharmas Raya	68.71	69.27	69.84	70.25	70.4
Pasaman Barat	63.92	64.56	65.26	66.03	66.83
Kota Padang	79.23	79.83	80.36	81.06	81.58
Kota Solok					
Kota Sawah Lunto	69.07	69.61	69.87	70.67	71.13
Kota Padang Panjang	74.54	75.05	75.98	76.5	77.01
Kota Bukit Tinggi	77.67	78.02	78.72	79.11	79.8
Kota Payakumbuh	76.34	76.49	77.42	77.56	77.91
Sumatera Barat	68.91	69.36	69.98	70.73	71.24

IPM NASIONAL

Provinsi / Kabupaten / Kota	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia				
	2013	2014	2015	2016	2017
Aceh	68.30	68.81	69.45	70	70.60
Sumatera Utara	68.36	68.87	69.51	70	70.57
Sumatera Barat	68.91	69.36	69.98	70.73	71.24
Riau	69.91	70.33	70.84	71.20	71.79
Jambi	67.76	68.24	68.89	69.62	69.99

Sumatera Selatan	66.16	66.75	67.46	68.24	68.86
Bengkulu	67.50	68.06	68.59	69.33	69.95
Lampung	65.73	66.42	66.95	67.65	68.25
Kep. Bangka Belitung	67.92	68.27	69.05	69.55	69.99
Kep. Riau	73.02	73.40	73.75	73.99	74.45
Dki Jakarta	78.08	78.39	78.99	79.60	80.06
Jawa Barat	68.25	68.80	69.50	70.05	70.69
Jawa Tengah	68.02	68.78	69.49	69.98	70.52
Di Yogyakarta	76.44	76.81	77.59	78.38	78.89
Jawa Timur	67.55	68.14	68.95	69.74	70.27
Banten	69.47	69.89	70.27	70.96	71.42
Bali	72.09	72.48	73.27	73.65	74.30
Nusa Tenggara Barat	63.76	64.31	65.19	65.81	66.58
Nusa Tenggara Timur	61.68	62.26	62.67	63.13	63.73
Kalimantan Barat	64.30	64.89	65.59	65.88	66.26
Kalimantan Tengah	67.41	67.77	68.53	69.13	69.79
Kalimantan Selatan	67.17	67.63	68.38	69.05	69.65
Kalimantan Timur	73.21	73.82	74.17	74.59	75.12
Kalimantan Utara	67.99	68.64	68.76	69.20	69.84
Sulawesi Utara	69.49	69.96	70.39	71.05	71.66
Sulawesi Tengah	65.79	66.43	66.76	67.47	68.11
Sulawesi Selatan	67.92	68.49	69.15	69.76	70.34
Sulawesi Tenggara	67.55	68.07	68.75	69.31	69.86
Gorontalo	64.70	65.17	65.86	66.29	67.01
Sulawesi Barat	61.53	62.24	62.96	63.60	64.30
Maluku	66.09	66.74	67.05	67.60	68.19
Maluku Utara	64.78	65.18	65.91	66.63	67.20
Papua Barat	60.91	61.28	61.73	62.21	62.99
Papua	56.25	56.75	57.25	58.05	59.09
Indonesia	68.31	68.90	69.55	70.18	70.81

Untuk 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat pada Tahun 2017, IPM tertinggi adalah Kota Padang sebesar 81,58 dan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 59,25, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.15
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2013-2017

WILAYAH	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
KABUPATEN					
Kepulauan Mentawai	56.33	56.73	57.41	58.27	59.25
Pesisir Selatan	67.31	67.75	68.07	68.39	68.74
Solok	66.15	66.44	67.12	67.67	67.86
Sijunjung	64.48	64.95	65.30	66.01	66.60
Tanah Datar	68.12	68.51	69.49	70.11	70.37

Padang Pariaman	67.15	67.56	68.04	68.44	68.90
Agam	68.73	69.32	69.84	70.36	71.10
Lima Puluh Kota	66.30	66.78	67.65	68.37	68.69
Pasaman	62.91	63.33	64.01	64.57	64.94
Solok Selatan	65.86	66.29	67.09	67.47	67.81
Dharmasraya	68.71	69.27	69.84	70.25	70.40
Pasaman Barat	63.92	64.56	65.26	66.03	66.83
KOTA					
Padang	79.23	79.83	80.36	81.06	81.58
Solok	75.54	76.20	76.83	77.07	77.44
Sawahlunto	69.07	69.61	69.87	70.67	71.13
Padang Panjang	74.54	75.05	75.98	76.50	77.01
Bukittinggi	77.67	78.02	78.72	79.11	79.80
Payakumbuh	76.34	76.49	77.42	77.56	77.91
Pariaman	74.51	74.66	74.98	75.44	75.71
SUMATERA BARAT (Provinsi)	68.91	69.36	69.98	70.73	71.24

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2018

Salah satu komponen IPM adalah rata-rata lama sekolah (RLS) untuk melihat jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalankan pendidikan formal. Di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017, RLS yang tertinggi berada di Kota Padang Panjang sebesar 11,43 tahun, diikuti oleh Kota Padang 11,32 tahun, Kota Bukittinggi 11,30 tahun, dan Kota Solok 10,95 tahun, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rata-rata lama sekolahnya adalah 6,69 tahun. Kondisi rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.16.

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2013-2017

KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
KABUPATEN					
Mentawai	6,17	6,19	6,27	6,52	6,69
Pesisir Selatan	8,05	8,10	8,11	8,12	8,13

Solok	7,53	7,56	7,57	7.58	7,60
Sijunjung	7,30	7,32	7,33	7.50	7,72
Tanah Datar	7,78	7,80	7,93	8.12	8,14
Padang Pariaman	6,86	6,88	6,89	7	7,21
Agam	8,09	8,10	8,17	8.18	8,39
Lima Puluh kota	7,58	7,59	7,91	7.92	7,96
Pasaman	7,60	7,62	7,63	7.64	7,65
Solok Selatan	7,80	7,97	7,98	7.99	8
Dharmasraya	7,94	7,99	8,03	8.23	8,24
Pasaman Barat	7,50	7,53	7,83	7.84	7,85
KOTA					
Padang	10,89	10,93	10,97	11.24	11,32
Solok	10,72	10,75	10,77	10.79	10,95
Sawahlunto	9,45	9,65	9,66	9.92	9,93
Padang Panjang	10,53	10,79	11,09	11.42	11,43
Bukittinggi	10,66	10,71	10,79	10.98	11,30
Payakumbuh	9,93	9,96	10,29	10.30	10,45
Pariaman	9,88	9,94	9,96	10.09	10,10
SUMATERA BARAT	8,28	8,29	8,42	8,59	8,72

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Komponen pembentukan IPM yang lain adalah Angka Harapan Hidup, yang memperlihatkan derajat kesehatan suatu masyarakat, yang dihitung dari sensus dan survey kependudukan, terlihat Angka Harapan Hidup di Provinsi Sumatera Barat sejak Tahun 2013-2017 mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2013 sebesar 68,21 tahun dan pada Tahun 2017 usia harapan hidup menjadi 68,78 tahun, seperti terlihat pada grafik berikut ini.

Tabel 1.17
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kota
Se Sumatera Barat 2013-2017

Wilayah	Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru				
	Angka Harapan Hidup				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kepulauan Mentawai	63.53	63.55	64.05	64.36	64.37
Pesisir Selatan	69.43	69.46	69.96	70.11	70.23
Kab.Solok	66.90	66.95	67.35	67.50	67.65
Sijunjung	64.72	64.72	65.22	65.33	65.44

Tanah Datar	68.28	68.35	68.75	68.93	69.11
Padang Pariaman	67.18	67.24	67.64	67.80	67.96
Agam	70.78	70.80	71.30	71.44	71.57
Lima Puluh Kota	69.19	69.22	69.23	69.27	69.31
Pasaman	65.73	65.76	66.26	66.40	66.54
Solok Selatan	66.02	66.04	66.64	66.78	66.92
Dharmasraya	69.72	69.76	70.16	70.30	70.44
Pasaman Barat	66.90	66.93	67.03	67.09	67.15
Padang					
Kota Solok	72.33	72.34	72.74	72.83	72.92
Sawahlunto	69.14	69.17	69.27	69.33	69.39
Padang Panjang	72.44	72.44	72.45	72.45	72.46
Bukittinggi	73.12	73.12	73.52	73.60	73.69
Payakumbuh	72.43	72.43	72.93	73.03	73.13
Pariaman	69.48	69.49	69.59	69.63	69.67
SUMATERA BARAT (Provinsi)	68.21	68.32	68.66	68.73	68.78
Kepulauan Mentawai	63.53	63.55	64.05	64.36	64.37

Sedangkan pengeluaran perkapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli di Sumatera Barat terlihat pada tahun 2013 adalah Rp.9.570.000,00/Orang/Tahun menjadi Rp.10.306.000,00/Orang/Tahun pada Tahun 2017. Pengeluaran perkapita yang tertinggi di Sumatera Barat adalah Kota Padang sebesar Rp.13.957.000,00/Orang/Tahun, diikuti oleh Kota Payakumbuh sebesar Rp.12.858.000,00/Orang/Tahun, Kota Bukittinggi sebesar Rp.12.816.000,00/Orang/Tahun. Sedangkan yang terendah pengeluaran perkapitanya adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp.6.010.000,00/Orang/Tahun. Perkembangan pengeluaran perkapita di Sumatera Barat dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.18

Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2013-2017 (ribuan Rupiah/Orang/Tahun)

KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
KABUPATEN					
Kep. Mentawai	5.451	5.566	5.684	5.771	6.010
Pesisir Selatan	8.233	8.368	8.412	8.605	8.819
Solok	9.118	9.228	9.334	9.664	9.743
Sijunjung	9.599	9.726	9.796	9.895	10.093
Tanah Datar	9.893	10.014	10.103	10.296	10.331
Padang Pariaman	9.937	9.990	10.260	10.455	10.579
Agam	8.637	8.692	8.859	9.111	9.388

Lima Puluh kota	8.568	8.672	8.774	8.936	9.151
Pasaman	6.964	7.058	7.340	7.678	7.882
Solok Selatan	9.291	9.390	9.653	9.802	9.891
Dharmasraya	10.505	10.550	10.713	10.781	10.951
Pasaman Barat	7.809	7.897	8.109	8.393	8.704
KOTA					
Padang	13.339	13.387	13.522	13.721	13.957
Solok	10.784	10.927	11.350	11.519	11.673
Sawahlunto	8.665	8.780	8.931	9.051	93.43
Padang Panjang	9.307	9.369	9.670	9.804	10.240
Bukittinggi	12.002	12.137	12.330	12.475	12.816
Payakumbuh	12.212	12.296	12.622	12.705	12.858
Pariaman	11.508	11.541	11.814	12.141	13.425
SUMBAR	9.570	9.621	9.804	10.126	10.306

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2018

7. Kondisi Perekonomian

Perekonomian Sumatera Barat tahun 2018 tumbuh sebesar 5,29%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Jasa pendidikan merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,94%, diikuti oleh penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,76% dan informasi dan komunikasi sebesar 8,74%. Struktur perekonomian Sumatera Barat menurut lapangan usaha tahun 2017 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan (23,55%); perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil, sepeda motor (15,05%), transportasi dan pergudangan (12,64%). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2017, perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,00%, diikuti transportasi dan pergudangan sebesar 0,84%, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,79%.

Tabel 1.19

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 tahun 2012-2017 (%)

LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN EKONOMI					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2.63	3.42	5.86	4.33	1.96	3.40
2. Pertambangan dan	5.82	7.61	4.34	3.58	2.00	1.13

Penggalian						
3. Industri Pengolahan	6.46	5.14	5.40	1.84	4.90	2,56
4. Pengadaan Listrik & Gas	8.14	3.56	8.68	0.84	10.94	4,06
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	3.69	4.92	3.89	5.99	6.40	3,96
6. Konstruksi	9.96	10.30	6.58	6.85	6.59	7,23
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.62	6.31	5.30	5.10	5.32	6,50
8. Transportasi dan Pergudangan	7.77	8.47	7.51	8.07	7.65	7,10
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.29	5.90	6.44	6.85	11.15	8,76
10. Informasi dan Komunikasi	11.75	9.11	8.37	9.86	9.17	8,74
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	9.79	6.27	5.14	3.63	8.03	2,11
12. Real Estate	4.60	5.50	5.56	5.30	5.37	4,49
13. Jasa Perusahaan	5.96	7.30	6.97	6.15	5.63	5,19
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.16	1.75	1.95	4.71	4.96	4,49
15. Jasa Pendidikan	10.13	8.39	6.18	8.92	8.49	9,94
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.55	7.76	7.97	7.27	4.58	8,58
17. Jasa Lainnya	6.79	5.30	6.52	7.46	9.95	7,95
PDRB SUMATERA BARAT	6,31	6,02	5,85	5,41	5,26	5,29

Sumber Data : Berita Resmi Statistik No. 10/02/13/Th. XXI, 5 Februari 2018

* Angka sementara

Struktur perekonomian Sumatera Barat menurut lapangan usaha Tahun 2017 didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha utama yaitu : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 23,61%, Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor 14,79% serta Transportasi dan Pergudangan 11,54%, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.20
Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Di Sumatera Barat, Tahun 2013-2018

NO	KATEGORI	2013	2014	2015	2016	2017 (TW III)*	2018 (TW II)*	RATA-RATA KONTRIBUSI TERHADAP PDRB (%)
1.	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	24,68	24,99	24,77	24,06	23,61	13,63	22,62
2.	Pertambangan dan Penggalian	4,60	4,88	4,84	4,54	4,19	7,92	5,16
3.	Industri Pengolahan	11,02	10,56	10,21	10,11	9,78	19,83	11,9
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,10	0,11	0,11	1,18	0,27
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,8

	Ulang							
6.	Konstruksi	8,77	9,09	9,41	9,31	9,32	10,17	9,34
7.	Pedagang Besar & Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,77	14,38	14,64	14,90	14,94	12,97	14,43
8.	Transportasi dan Pergudangan	10,58	11,32	11,76	12,07	12,88	5,44	10,06
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,05	1,07	1,13	1,23	1,35	2,78	1,43
10.	Informasi dan Komunikasi	5,56	5,26	5,13	4,74	5,14	3,73	4,92
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,16	3,15	3,10	3,11	3,02	4,10	3,27
12.	Real Estate	1,92	1,93	1,97	2,01	1,93	2,74	2,08
13.	Jasa Perusahaan	0,42	0,43	0,42	0,43	0,43	1,79	0,65
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	6,39	6,29	5,89	5,71	5,97	3,60	5,64
15.	Jasa Pendidikan	3,46	3,69	3,62	3,71	4,10	3,16	3,62
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,32	1,34	1,28	1,25	1,29	1,05	1,25
17.	Jasa Lainnya	1,51	1,62	1,63	1,69	1,85	1,80	1,68
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : BPS * Angka sementara

Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2018 terhadap triwulan IV-2016 terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi dicapai Komponen Impor Luar Negeri sebesar 71,82%; diikuti Ekspor Luar Negeri sebesar 8,59%; Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,48%. Sebaliknya, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar negatif 9,40%. Struktur PDRB Sumatera Barat menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan IV 2018 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sumatera Barat. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto; Pengeluaran Konsumsi

Pemerintah; Ekspor Luar Negeri; dan Impor Luar Negeri, sedangkan Pengeluaran Konsumsi LNPRT relatif kecil. Dibandingkan dengan struktur PDRB menurut Pengeluaran pada triwulan III-2018, peranan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sedikit menurun yaitu dari 52,58% pada triwulan III-2018 menjadi 52,56% pada triwulan IV-2018. Komponen lain yang perannya meningkat adalah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yaitu dari 12,93 menjadi 16,48%; dan Ekspor Luar Negeri dari 11,06 menjadi 12,14%. Peran Ekspor Neto Antar Daerah pada triwulan ini mencapai negative 8,02%. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Sumatera Barat merupakan perekonomian terbuka. Banyak sekali kebutuhan masyarakat Sumatera Barat yang dipenuhi dari provinsi lain (import dalam negeri).

Ekspor non migas Sumatera Barat bulan Januari 2018 terjadi pada beberapa negara tujuan, nilai ekspor terbesar adalah ke negara Amerika Serikat sebesar US\$ 60,02 juta, selanjutnya ke negara India sebesar US\$ 46,06 juta, dan Singapura sebesar US\$16,58 juta. Sementara itu nilai ekspor ke negara Myanmar dan Bangladesh masing-masing nilainya sebesar US \$4,03 juta; dan US\$3,75 juta. Peningkatan ekspor non migas bulan Januari 2018 jika dibandingkan dengan bulan Desember 2018 terjadi pada beberapa negara tujuan, diantaranya ke negara Amerika Serikat naik hampir dua kali lipat (188,75%). Selama Januari 2018 ekspor kenegara Amerika Serikat memiliki peran yang terbesar terhadap total ekspor Sumatera Barat yaitu sebesar 42,76%, berikutnya ekspor ke India memberikan peran sebesar 32,81%, dan Singapura 11,81%. Dengan demikian, selama Januari 2018 peran total ekspor ke tiga negara tersebut sebesar 87,39%.

Tabel 1.21

Ekspor Non Migas Sumatera Barat Menurut Negara Tujuan Tahun 2018

NO	NEGARA TUJUAN	NILAI EKSPOR JUTA US\$	% TERHADAP EKSPOR
1	Amerika Serikat	122,31	29,71
2	India	125,63	30,52
3	Singapura	-	-
4	Myanmar	7,03	1,71
5	Bangladesh	35,92	8,73
6	Malaysia	11,58	2,81
7	Selandia Baru	-	-
8	Srilanka	8,70	2,11
9	Mozambique	-	-
10	Jepang	-	-
11	Lainnya	26,64	6,47
TOTAL EKSPOR		338,44	82,22

Sumber Data: Berita Resmi Statistik, No.12/02/13/Th.XXI, 15 Februari 2018

Ekspor produk Industri Pengolahan mengalami peningkatan sebesar 9,85%. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total ekspor Sumatera Barat periode Januari 2018 sebesar 97,34%, seperti terlihat pada tabel 1.22 berikut ini.

Tabel 1.22
Ekspor Non Migas Sumatera Barat Menurut Sektor
Januari 2017- Januari 2018

NO	SEKTOR	NILAI EKSPOR (JUTA US\$)	% PERAN TERHADAP EKSPOR JAN 2018- MARET 2018
		Jan 2018	
1	Industri Pengolahan	400,65	97,34
2	Pertambangan	7,68	1,87
3	Pertanian	3,28	0,80
TOTAL EKSPOR		411,61	100

Sumber Data: Berita Resmi Statistik, No.12/02/13/Th.XXI, 15 Februari 2018

Ekspor senilai US\$140,36 juta pada bulan Januari 2018 sebagian besar berasal dari pelabuhan muat Teluk Bayur. Ekspor melalui pelabuhan muat Teluk Bayur ini mengalami peningkatan sebesar 5,81% dibanding bulan sebelumnya, tetapi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (turun 30,31%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel

Tabel 1.23
Ekspor Non Migas Sumatera Barat Menurut Pelabuhan Muat
Jan 2017 – Jan 2018

NO	PELABUHAN MUAT	NILAI EKSPOR (JUTA US\$)		% TERHADAP EKSPOR
		2015	2016	
1	Teluk Bayur	201,38	140,34	99,98
2	Bandara Inter. Minangkabau	-	0.02	0.02
TOTAL EKSPOR		201,38	140,36	100

Sumber Data: Berita Resmi Statistik, No.12/02/13/Th.XXI, 15 Februari 2018

Nilai impor Sumatera Barat selama bulan Januari 2018 mencapai US\$62,82 juta, mengalami peningkatan sebesar 40,75% dibandingkan dengan impor bulan Desember 2017 yang tercatat senilai US\$44,63 juta. Sementara itu jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya nilai impor Januari 2018 naik hampir 40,05%.

Dari beberapa golongan barang, impor bulan Januari 2018 yang terbesar adalah golongan bahan bakar mineral sebesar US\$49,15 juta. Sementara itu, golongan pupuk sebesar US\$6,09 juta, golongan ampas sisa industri makanan sebesar US\$3,40 juta, golongan kertas/karton sebesar US\$1,88, dan golongan garam, belerang, kapur sebesar US\$1,00 juta. Peran dari kelima golongan barang tersebut terhadap total impor selama bulan Januari 2018 mencapai 97,95%.

Tabel 1.24
Impor Beberapa Golongan Barang di Sumatera Barat Januari 2018

NO	GOLONGAN BARANG	NILAI IMPOR JUTA US\$	% TERHADAP IMPOR
1	Bahan bakar mineral	95,36	76,09
2	Pupuk	-	-
3	Garam,Belerang,Kapur	3,30	2,63

4	Kertas/Karton	3,44	2,75
5	Ampas/Sisa Industri makanan	7,61	6,07
6	Lainnya	2,06	1,63
TOTAL IMPOR		111,76	89,18

Sumber Data: Berita Resmi Statistik, No.12/02/13/Th.XXI, 15 Februari 2018

Dari total impor bulan Januari 2018 terlihat impor terbesar berasal dari negara Singapura senilai US\$49,25 juta, selanjutnya dari negara Fed. Russia US \$3,41 juta, Argentina US \$3,40 juta, Kanada US \$3,28 juta, dan Swedia senilai US\$ 1,28 juta. Selama periode Januari 2018 terlihat bahwa impor dari kelima negara tersebut sebesar 96,51%. Negara Singapura menduduki tempat teratas dengan perannya sebesar 78,40%.

Tabel 1.25

Impor Sumatera Barat Menurut Negara Asal Desember 2018

NO	NEGARA TUJUAN	NILAI IMPOR JUTA US\$	% TERHADAP IMPOR
1	Singapura	95,33	76,08
2	Fed Russia	4,39	3,50
3	Argentina	6,70	5,35
4	Kanada	-	-
5	Swedia	-	-
6	Lainnya	3,72	3,01
TOTAL IMPOR		110,14	87,89

Sumber Data: Berita Resmi Statistik, No.12/02/13/Th.XXI, 15 Februari 2018

Untuk impor menurut pelabuhan bongkar di Sumatera Barat, sebagian besar berasal dari pelabuhan bongkar Teluk Bayur dan lainnya melalui Bandara Internasional Minangkabau, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.26

**Impor Sumatera Barat Menurut Pelabuhan Bongkar
Desember 2017- Maret 2018**

NO	PELABUHAN MUAT	NILAI IMPOR (JUTA US\$)	% TERHADAP IMPOR	NILAI IMPOR (JUTA US\$)	% TERHADAP IMPOR
		2017		2018	
1	Teluk Bayur	44,59	99,92	125,07	99,81
2	Bandara Inter. Minangkabau	0,04	0,08	0,24	0,19
TOTAL EKSPOR		44,63	100	125,31	100

Sumber Data: Berita Resmi Statistik, No.12/02/13/Th.XXI, 15 Februari 2018

Perekonomian di Sumatera Barat juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi, dimana barometer inflasi di Sumatera Barat adalah Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Inflasi di Kota Padang terjadi karena adanya peningkatan harga pada lima kelompok pengeluaran yaitu; kelompok bahan makanan sebesar 0,72%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,91%, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,47%, kelompok sandang sebesar 0,64%, dan kelompok pendidikan,

rekreasi dan olah raga sebesar 0,43%. Sementara itu kelompok kesehatan dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami penurunan harga masing-masing sebesar 0,40% dan 0,43%. Di Kota Bukittinggi inflasi terjadi pada semua kelompok pengeluaran antara lain; kelompok bahan makanan sebesar 1,60%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,20%, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,57%, kelompok sandang sebesar 0,26%, kelompok kesehatan sebesar 1,23%, kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,15% dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,65%.

Indikator lain dalam meningkatkan perekonomian di Sumatera Barat adalah pariwisata, dimana Sumatera Barat merupakan salah satu tujuan wisata yang menarik di Indonesia. Dari sektor pariwisata diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitarnya, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja serta kesempatan berusaha sekaligus memperkenalkan identitas dan kebudayaan bangsa.

Perkembangan industri pariwisata tidak lepas dari jumlah kunjungan wisatawan, Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPK) dan rata-rata lama menginap untuk tamu asing dan tamu dalam negeri. Dari tiga indikator tersebut dapat mencerminkan perkembangan pariwisata di Sumatera Barat.

Jumlah wisatawan manca negara (wisman) yang berkunjung ke Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan Pelabuhan Teluk Bayur pada bulan Januari - Desember 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.27
Wisman Yang Berkunjung ke Sumatera Barat Menurut Kebangsaan
Tahun 2017-2018 (Orang)

NO	KEBANGSAAN	2017	2018
1	Malaysia	38.453	10.235
2	Australia	2.473	380
3	Thailand	275	-
4	Perancis	475	-
5	Inggris	366	113
6	Jerman	219	77
7	Singapura	235	909
8	Amerika	399	91
9	Tiongkok	390	54
10	Jepang	180	82
11	Lainnya	6.221	135
TOTAL WISMAN		49.686	56.313

Sumber : Berita Resmi Statistik No.07/02/13/Th.XXI, 1 Februari 2018

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang bulan Desember 2018 berdasarkan laporan yang masuk mencapai rata-rata 53,47% atau mengalami penurunan sebesar 0,16 poin dibanding TPK Desember 2018

yang tercatat sebesar 64,89%. Kota Padang menempati TPK tertinggi sebesar 58,13% dan disusul Kota Bukittinggi dengan TPK sebesar 51,62%. Sementara itu, TPK di Kabupaten Agam tercatat sebesar 24,59%.

Tabel 1.28

TPK Hotel Berbintang beberapa Kabupaten/Kota Sumatera Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	TPK (%)	
		DES 2017	MARET 2018
1	Kabupaten Agam	32,96	24,59
2	Kota Padang	67,19	58,13
3	Kota Bukittinggi	70,10	51,62
	Sumatera Barat	64,89	53,47

Sumber : Berita Resmi Statistik No.07/02/13/Th.XXI, 1 Februari 2018.